

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN CICAHEUM KECAMATAN
KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

*The Effect of Policy Implementation on the Effectiveness of Program Keluarga Harapan
in Kelurahan Cicaheum Kiaracondong District Bandung City*

Jehan Filah Falahan¹ Ero Suhara²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya kebijakan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Warwick (Kadji :2008) dan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers:2003). Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif. sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap Efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

ABSTRACT

The problem in this research is the ineffectiveness of the Program Keluarga Harapan policy. Based on this phenomenon, the researcher suspects that the problem is influenced by the variables of policy implementation. Based on these problems, the formulation of the problem proposed is: "How Big is the Effect of Policy Implementation on the Effectiveness of Program Keluarga Harapan". Analysis of the research problem was carried out using the policy implementation theory as proposed by Warwick (Kadji: 2008) and the effectiveness theory proposed by Duncan (Steers: 2008). The method in this research is an explanatory survey method. while the sources of data collection using literature studies and field studies which include: questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique used is a simple random sample. The data analysis technique used is linear regression analysis. Based on the results of data processing carried out, research results show that there is a positive and significant relationship between policy implementation and the effectiveness of Program Keluarga Harapan policies. Thus the hypothesis proposed in this study was tested empirically.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan uji coba penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di beberapa Provinsi. Program serupa di Negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Tujuan utama Program keluarga harapan ini adalah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Millennium (*MDG's*).

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem

perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. UU No. 13 Tahun 2011 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

PKH diharapkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.

Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, balita (bawah lima tahun) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Untuk mencapai tujuan ini, penerima bantuan PKH Komponen Kesehatan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di keluarahan bagi ibu hamil dan nifas, memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas

pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di keluarahan bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif, dan memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di keluarahan bagi bayi dan balita.

Namun pada kenyataannya, Program ini masih terdapat kekurangan. Dilapangan masih ada ditemukan bahwa program ini tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya layak menerima, tapi tidak menerima bantuan. Begitu juga sebaliknya, ada yang sebetulnya tidak layak menerima, tapi pada kenyataannya menerima bantuan tersebut. Sehingga sasarannya tidak sesuai dengan harapan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Keluarga Harapan. Kota Bandung berada di Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 30 kecamatan. Salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kecamatan Kiaracondong. Kecamatan Kiaraconodng terdiri dari 6 keluarahan, salah satu keluarahan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan yakni Kelurahan Cicaheum. Di Kelurahan Cicaheum terdapat warga miskin yang cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabell.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Kelurahan Cicaheum dari 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2017	1090
2018	1095
2019	1115

Sumber: data.bandung.go.id

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kelurahan Cicaheum terus mengalami kenaikan, sehingga hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus

dipecahkan. Kota Bandung sendiri sudah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2013, berarti sudah hampir 8 tahun program ini berjalan hingga tahun 2022.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di ketiga komponen yang menjadi fokus Program Keluarga Harapan pada kelompok masyarakat miskin. Berikut adalah data target dan realisasi dari program keluarga harapan di Kelurahan Cicaheum beberapa tahun sebelumnya:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Peserta Program kegiatan Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan dan Pendidikan

Sumber: Koordinator PKH Kelurahan Cicaheum

Tahun	Target Penerima PKH	Realisasi Penerima PKH	Persentase Realisasi dari Target Penerima
2019	294	210	71.4%
2020	368	256	69.5%
2021	370	266	71.8%

Dari data diatas bisa dilihat bahwa implementasi kebijakan PKH tidak terlalu memberikan dampak yang konkrit atau belum efektif terhadap pemberantasan angka kemiskinan di Kelurahan Cicaheum. Seharusnya dengan adanya PKH angka kemiskinan dan jumlah penerima bantuan PKH dari tahun ke tahun harusnya mengalami penurunan bukan malah mengalami kenaikan seperti data diatas yang telah disajikan.

Tentu, dengan adanya kondisi tersebut, adalah kondisi yang tidak ideal dalam praktek implementasi sebuah kebijakan. Kondisi tersebut menggambarkan harapan dan realita yang ada di lapangan berbeda.

Berdasarkan adanya indikasi permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang: “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini:

Grindle, “Menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu” (Mulyadi, 2015:47).

Kemudian Gunn dan Hoogwood, “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial” (Tahir, 2014:55)

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-

program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Sondang P. Siagian yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2002:24)

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerjaberarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapainya dalam waktu yang telah ditetapkan pula (Siagian, 2002:171)

Model proses efektivitas merupakan model yang menekankan proses proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan terakhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Model ini mengimplikasikan bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana saling hubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya organisasi. Tiga dimensi utama dari model

ini yang dijelaskan oleh Richards M.Steers, yaitu (Steers, 1980:193).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai output yang di harapkan dari sejumlah input. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Grindle menyatakan, “Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”

Kemudian menurut Edward III, “Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat” (Mulyadi, 2015:47).

Dan menurut Lester dan Stewart, “Menyatakan bahwa implementasi sebagai

suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih” (Nastia, 2014:201).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT). Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada KM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak - anak. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:16) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan, pendekatan penelitian deksriptif menurut Sugiyono (2018:89) adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deksriptif. Penelitian melalui metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deksriptif ini bertujuan untuk mendeksripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi dengan menggunakan angka-angka dan untuk membuktikan seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum.

4. PEMBAHASAN

Peneliti akan mengemukakan analisis kuantitatif hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum. Dimana peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan angket berkenaan dengan dua variabel tersebut kepada 80 (Delapan Puluh) orang responden. Hasil yang diperoleh berupa data dalam bentuk ordinal, sebelum data tersebut dianalisis, data tersebut ditingkatkan menjadi data dalam bentuk ordinal dan diuji validitas dan reabilitas untuk memastikan bahwa sasaran atau hasil yang diinginkan dicapai adalah sah (*Valid*) (*Reliable*).

Dari hasil pengujian, kuesioner yang berisi dari 2 variabel ini ada 80 kuesioner yang telah diisi oleh 80 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu.

Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $80-2 = 78$, sehingga r tabel = 0,220. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel ada 80 kuisisioner yang dinyatakan valid. Sehingga kuisisioner dinyatakan valid karena r hitung lebih dari r tabel.

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Jika dalam suatu alat ukur dipakai 2 (dua) kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dianggap reliabel (dapat dipercaya/diandalkan). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen (alat) pengukuran yang baik. Ide utama dari konsep reliabilitas ini adalah sejauhmana hasil ukuran dapat dipercaya, yaitu sejauhmana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (error of measurement).

Konsep reliabilitas lebih menekankan pada persoalan konsistensi, untuk melihat reliabilitas maka syarat yang harus dipenuhi adalah r hitung dengan taraf signifikan 10% dimana $n= 80$ harus lebih besar dari r tabel. Dalam hal ini koefisien korelasi untuk product moment untuk adalah r tabel 0,300.

Selanjutnya uraian mengenai tingkat reliabilitas data angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Reliabilitas Variabel Pengaruh Implementasi Terhadap Efektivitas

Variabel	Nilai r	Nilai r Tabel	Ket
Implementasi	0,789	0,60	Reliabel
Efektivitas	0,803	0,60	reliabel

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai r kritis lebih besar daripada

nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada kedua variabel Implementasi Kebijakan dan variabel Efektivitas berada pada klasifikasi Reliabilitas Kuat

Hasil tersebut di atas, sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan koefisien korelasi (r) dalam hubungannya dengan penentuan klasifikasi reliabilitas digunakan menurut Guilford dalam Sugiyono (2005:216) sebagai berikut:

0,00 - 0,20	reliabilitas sangat rendah
0,20 - 0,40	reliabilitas rendah
0,40 - 0,70	reliabilitas sedang
0,70 - 0,90	reliabilitas kuat
0,90 - 1,00	reliabilitas sangat kuat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban variabel (X) implementasi, menunjukkan bahwa dari empat dimensi yang diajukan untuk implementasi, untuk pada dimensi Kemampuan Organisasi mendapatkan nilai paling besar yakni 47.50%, kedua dimensi Informasi mendapatkan nilai sebesar 31.7%, dimensi dukungan mendapatkan nilai 31.20% dan dimensi pembagian potensi dengan nilai paling terkecil yakni sebesar 30.50%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria pengukuran berdasarkan persentase keseluruhan apabila dirata-ratakan menghasilkan sebesar 35.2% Artinya Kelurahan Cicaheum belum sepenuhnya melaksanakan faktor-faktor implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Warwick dalam Kadji, (2015: 70-72) berpijak pada papran menurut Warwick diatas, implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika keempat faktir kritis (Kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi) dapat bekerja dengan baik, karena tidak mungkin setiap faktor berdiri sendiri, melainkan

akan bekerja bersama-sama dan satu sama lain saling mempengaruhi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban variabel (Y) Efektivitas, menunjukkan bahwa dari tiga dimensi yang diajukan untuk efektivitas, untuk pada dimensi Optimalisasi tujuan mendapatkan nilai paling besar yakni 62.50%, kedua dimensi adaptasi mendapatkan nilai sebesar 43.70% dan dimensi Integrasi mendapatkan nilai 43.20%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria pengukuran berdasarkan persentase keseluruhan apabila dirata-ratakan menghasilkan sebesar 49.8% Artinya Kelurahan Cicaheum belum sepenuhnya melaksanakan faktor-faktor efektivitas kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2005:92) diadaptasi dari Steers (1985: 53) diambil 3 (tiga) indikator pengukuran efektifitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk digunakan dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai digunakan dalam Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :
Koefisien Determinasi (KD) = $r^2 \times 100\%$

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditentukan nilai korelasinya adalah sebesar 0,858 Dari nilai korelasi tersebut dapat diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Determinasi (KD)} = (0,858)^2 \times 100\% = 0,736 \text{ atau } 73,6\%$$

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda terhadap Variabel Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum adalah

sebesar 73.6% dan sisanya sebesar 26.4% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum yang tidak diteliti.

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum

H_a : Terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel.

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 0.220. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 14,843 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 0.220. Nilai t hitung sebesar 14,843 berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa t tabel 0,220 lebih besar dari t hitung, atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum, mempunyai hubungan sebesar 0,858. pada taraf uji $\alpha = 0.05$ dan menurut Klasifikasi

reliabilitas digunakan menurut Guilford dalam Sugiyono, (2005:216) angka ini berada pada kisaran antara 0,70 – 0,90 dengan kriteria Reliabilitas Kuat. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tanpa diimplementasikan dengan efektif, maka tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa semakin dipenuhi unsur unsur variabel implementasi Kebijakan pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cicaheum.

Hasil perhitungan hubungan antara implementasi kebijakan dengan kualitas pelayanan tersebut pengaruhnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 0,858 dimana ttabel sebesar 0.220 masih lebih kecil dari harga thitung sebesar 14,843 sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Implementasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan memberi pengaruh terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum, melalui dimensi Kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi, optimalisasi tujuan, integrasi dan adaptasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum, serta

pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cicaheum.

Penelitian ini juga menghasilkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan belum efektif, sebagaimana dikemukakan Warwick dalam Kadji (2015:70-72) dan Duncan dalam (Steers:2003).

Hasil dari penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan yaitu variabel pengendalian, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Kelurahan Cicaheum harus lebih proaktif dalam mendata siapa saja yang termasuk keluarga miskin dan memenuhi syarat komponen PKH, namun tidak mendapatkan bantuan.

2. Begitupun sebaliknya, melakukan croscek kembali secara masif data yang telah ada. Apakah ada yang tidak layak mendapatkan bantuan tapi masih tercantum sebagai KPM.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan uang dan mengedukasi KPM dalam pemanfaatan bantuan. Agar bantuan yang diterima bisa memberikan dampak yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (1994). Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Handoyo, Eko, (2012) . Kebijakan Publik, Semarang, Widya Karya,
- Hamdi, Muchlis. Prof. MPA, PH.D. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Kapioru, Evan, Harlan. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Karniawati, Nia dan Indriyani, Dwi, Yuni. (2003) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi). Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 1
- Mulyadi, D. (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.

- Nastia. (2014). Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan Dalam Pengembangan Wilayah). *Journal Of Governance And Public Policy*.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratama, Rezki, Teddy. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu). *Journal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 1.
- Syahida, Agung. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). Tanjungpinang
- Siagian, Sondang P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Subarsono, Agustinus. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana,
- Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, (1980). *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik, Mhd. dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Thoha, Miftah. (2014) *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.